

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai indikator yang penting dalam menilai perekonomian dan untuk menganalisis dari hasil pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan negara maupun daerah. Ekonomi dapat mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelum sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana menghasilkan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif yang menunjukkan perubahan di ukur dengan data Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah atau Provinsi.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana terjadi di sebagian kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan masyarakat hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang bersifat menyeluruh dan permasalahan yang mengakibatkan tinggi rendah nya kemiskinan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu banyaknya jumlah penduduk, lambatnya pertumbuhan ekonomi,rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya angka pengangguran (Umiyati, 2021).

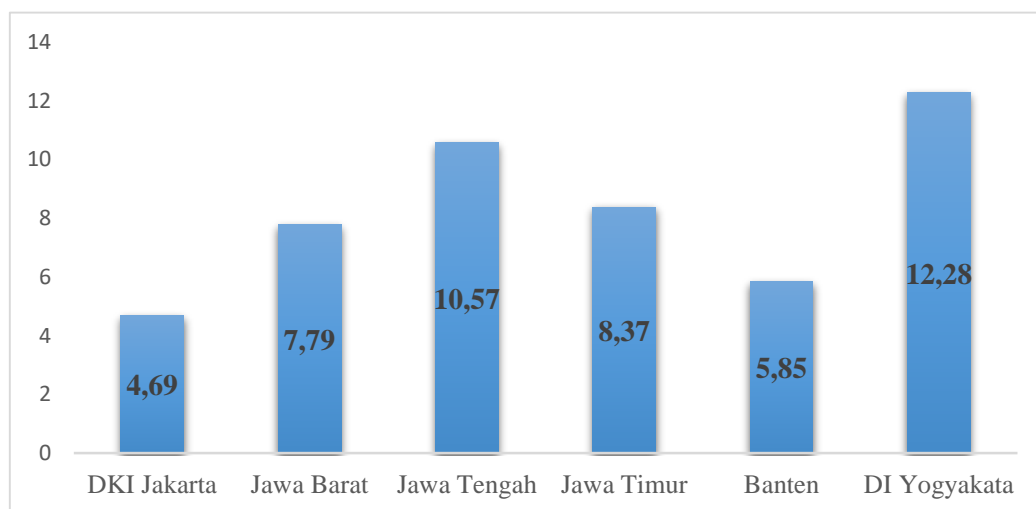
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat upaya upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang merujuk pada masalah perekonomian dan kehidupan sosial. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur oleh kemampuan masyarakat

memenuhi kebutuhan hidupnya rendah nya kualitas sumber daya manusia yang diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan sehingga mempengaruhi produktivitas dan menyebabkan beban ketergantungan masyarakat. (Londa, 2021).

Dalam Permensos Nomor 111/Huk/2021 tentang penetapan BPIJK dimana menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu, permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pulau Jawa adalah pulau terbesar di Indonesia dan memiliki penduduk paling banyak dan terdiri dari enam provinsi. Provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi tetapi pengelolaan sumber daya manusia yang rendah sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berikut adalah persentase kemiskinan yang berada di enam Provinsi Pulau Jawa.



Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020

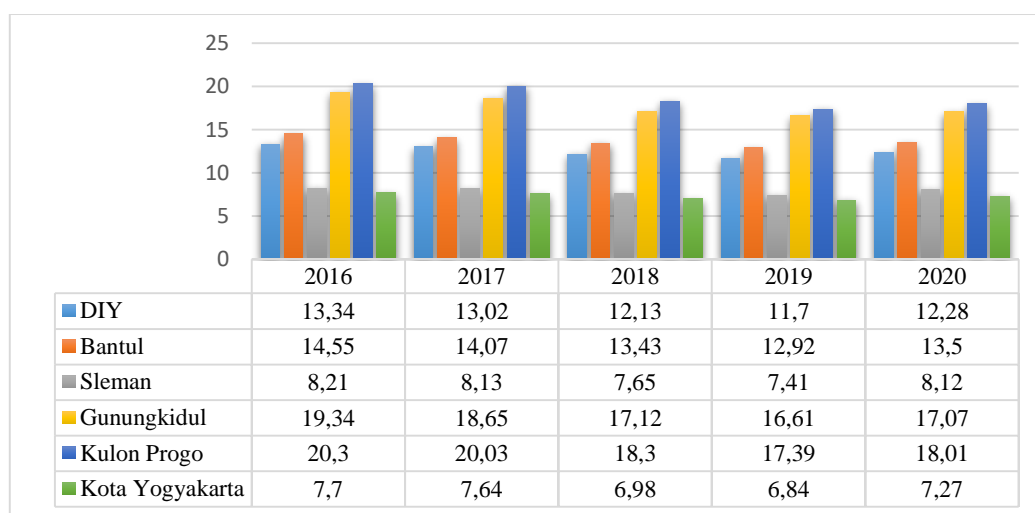
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar 1.1 Provinsi D.I Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan yang lebih besar dibandingkan dengan lima provinsi lain yang berada di Pulau

Jawa. Hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi D.I Yogyakarta paling tinggi dibandingkan dengan lima provinsi lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemerintah di Yogyakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan contohnya dengan memberikan program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Program pembangunan di Yogyakarta menjadi prioritas yaitu seperti penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Namun program bantuan pemerintah belum mampu mencapai pemerataan sehingga belum mampu mengatasi kemiskinan.

Berikut gambar Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020:



Gambar 1.2 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

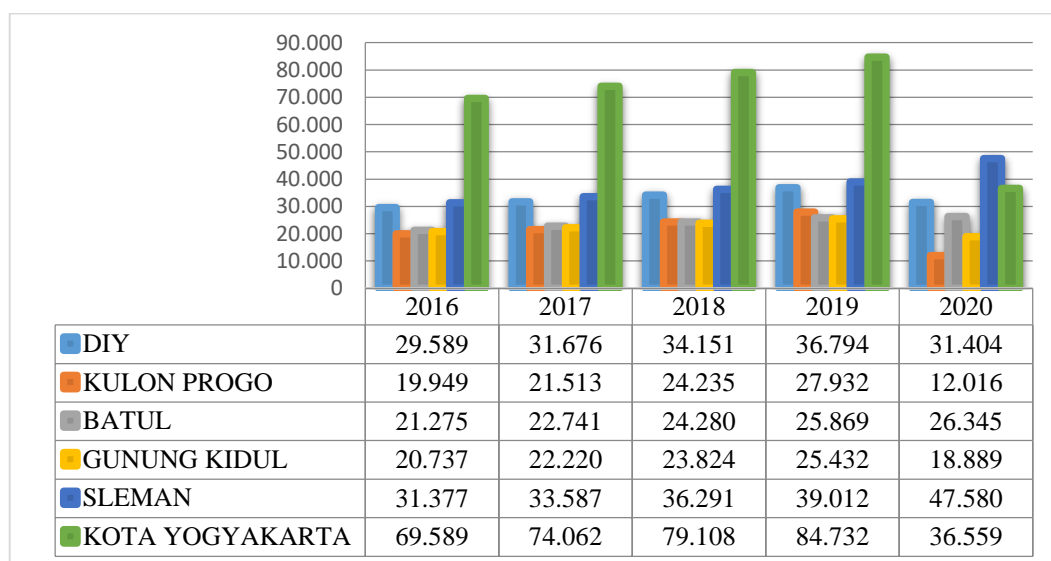
Sumber: BPS DIY 2020, data diolah

Berdasarkan gambar 1.2 di lihat dari kabupaten/kota D.I Yogyakarta persentase kemiskinan lima tahun terakhir tertinggi di kabupaten Kulon Progo

sebesar 18,01 persen, kemudian disusul Kabupaten Gunung Kidul sebesar 17,07 persen, di kabupaten Bantul dan Sleman masing masing sebesar 13,50 persen dan 8,12 persen dan persentase kemiskinan di Kota Yogyakarta yaitu 7,27 persen.

Kemiskinan di Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2016-2020 yaitu tercatat 12,28 persen, selanjutnya tingkat kemiskinan berangsur angsur mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dimana pada saat itu persentase penduduk miskin turun dari 13,34 persen menjadi 13,02 persen. Tetapi setelah itu naik dan adanya pandemi Covid 19 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan yang berangsur angsur.

Berikut adalah PDRB perkapita di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020:



Gambar 1.3 PDRB Pendapatan Perkapita Daerah Istimewa Yogyakarta (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, data diolah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari setiap tahun ke tahun. PDRB merupakan

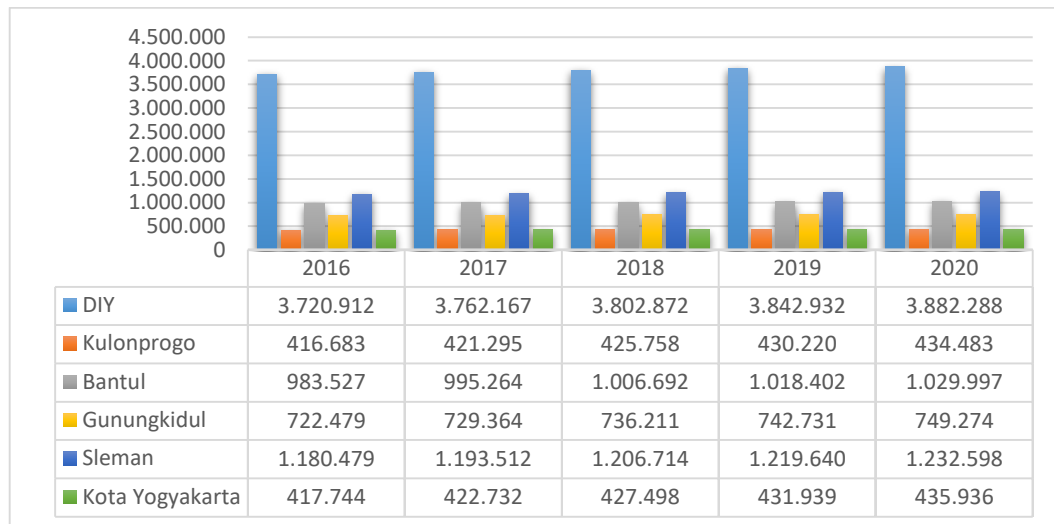
cerminan dari tingkat pendapatan masyarakat sedangkan dalam bidang non akademik peningkatan tersebut adanya perbaikan tingkat kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup dan aspek lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian Produk Domestik Regional Bruto secara agregatif menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut (Handani., et al 2021).

Dilihat dari gambar 1.3 bahwa data PDRB Pencapaian PDRB yang tinggi idealnya disertai pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Bila tidak maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Walaupun indikator pemerataan pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh, namun indeks gini dan PDRB per kapita dapat digunakan untuk melihat pendekatan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi pendapatan daerah kepada penduduknya. Berdasarkan hitungan nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Yogyakarta diperoleh gambaran kesenjangan angka PDRB per kapita antar daerah sampai dengan tahun 2016 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 69.589 juta rupiah. Tingginya angka PDRB per Kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai total PDRBnya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya relatif sedikit. Sementara itu kabupaten Sleman yang mempunyai nilai total PDRB tertinggi, angka PDRB per kapita Sleman jauh di bawah Kota Yogyakarta karena penduduk Sleman cukup besar yaitu hampir tiga kali lipat penduduk Kulon Progo. Sementara bila dibandingkan dengan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul maka PDRB per kapita

Kabupaten Sleman sebesar 1,5 kali lipat PDRB per kapita kedua kabupaten tersebut.

Sampai dengan tahun 2019 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 84.732 juta rupiah. Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai PDRB-nya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya relatif sedikit. Sementara itu Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai PDRB paling tinggi mencatat PDRB per kapita sebesar 39.012 juta rupiah, jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Sleman cukup besar yaitu 2,8 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. PDRB per kapita terendah adalah Gunungkidul yaitu 25.432 juta rupiah. Sementara itu, Bantul dan Kulon Progo masing-masing 25.869 juta rupiah dan 27.932 juta rupiah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018 Kulon Progo mulai melampaui Gunungkidul. Kondisi ini berkembang sampai 2020 PDRB perkapita tertinggi adalah Kabupaten Sleman yaitu 47.580 juta rupiah sedangkan Kota Yogyakarta 36.559 juta rupiah namun tetap saja menunjukkan kesenjangan yang cukup besar karena jumlah penduduk Kabupaten Sleman dua kali lipat dari Kota Yogyakarta. PDRB perkapita yang tidak tinggi namun tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat akan melahirkan ketimpangan pembangunan, PDRB perkapita yang tidak merata di beberapa wilayah kabupaten/kota, melainkan hanya wilayah kabupaten/kota tertentu atau segelintir orang kaya, maksudnya pertumbuhan ekonomi hanya bermanfaat bagi masyarakat kaya, sehingga perkembangan yang terjadi pada suatu wilayah yang tidak diikuti oleh wilayah lain belum mampu mendorong pemerataan pendapatan.

Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan dari hasil PDRB perkapita:



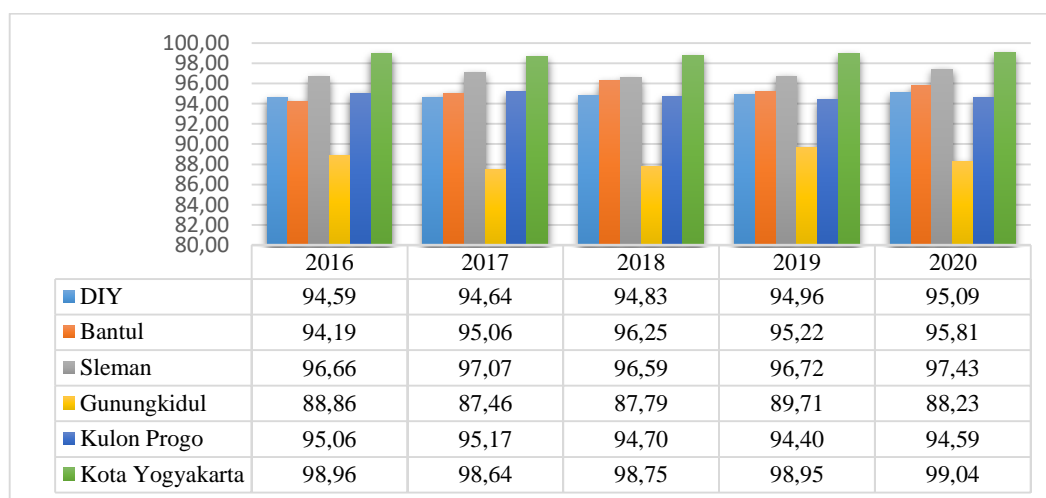
Gambar 1.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa) Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan karena ada interaksi akibat kemiskinan dengan tingkat pendapatan rendah, ketimpangan pendapatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kurang baik dan maksimal. Oleh karena itu diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, integrasi dan strategis (Umiyati, 2021).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah padat penduduk, jumlah penduduk di setiap tahun meningkat dan merupakan faktor dari penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan karena pekerjaan yang sempit sehingga tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang ada. Menurut pakar ekonomi yang dipimpin oleh Adam Smith, populasi adalah informasi potensial yang berharga untuk latihan faktor kreasi yang dapat membangun latihan kreasi keluarga dalam organisasi. Semakin besar populasi, semakin banyak pekerjaan yang dapat diakses.

Namun, menurut Robert Malthus (dikutip dalam Rofifah, 2020) bahwa penduduk di negara bagian yang mendasarinya benar-benar dapat mendukung pembangunan moneter, namun dalam kondisi ideal pembangunan penduduk tidak dapat memberdayakan pembangunan ekonomi namun dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.5 Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

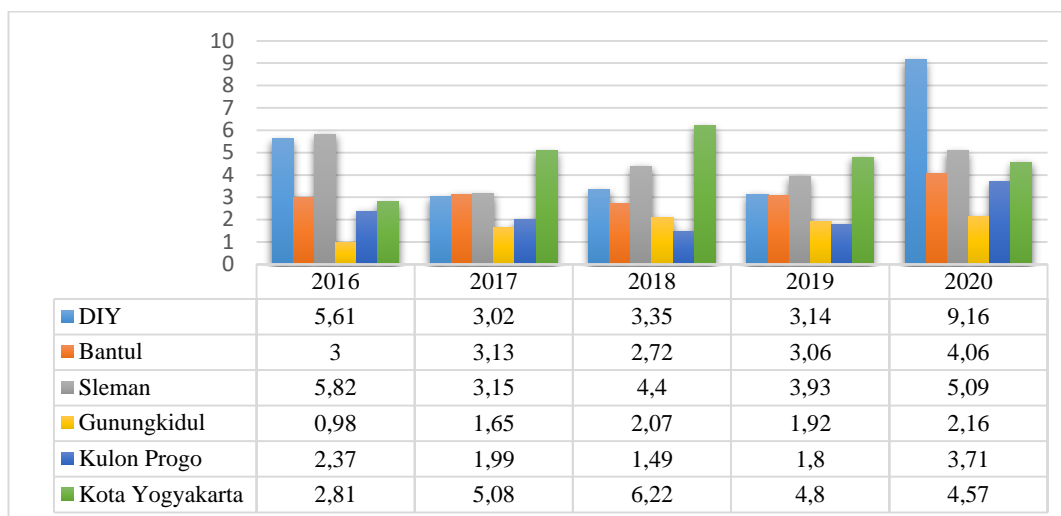
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu investasi (human investment) dalam hal ini, proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran

pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (Handani., et al 2021).

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Dariwardani (dikutip dalam Ariasih & Yuliarmi, 2021) bahwa pendidikan berkaitan dengan dengan kemiskinan, semakin tinggi pendidikan maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Namun lulusan pendidikan tinggi banyak yang menganggur merupakan masalah yang serius bagi Negara itu berarti tidak memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik. Hal tersebut terjadi sistem pendidikan diamati tidak sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang diperlukan di lapangan pekerjaan

Tingkat pendidikan dapat diukur dari angka melek huruf. Berdasarkan gambar 1.5 angka melek huruf di Yogyakarta pada tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung meningkat. Daerah Yogyakarta seringkali dijuluki sebagai kota pendidikan dimana pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun jika dilihat dari persentase tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta persentase kemiskinan paling tinggi, hal ini erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan yaitu dengan perkembangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang menetap sehingga menyebabkan pengangguran dan mempengaruhi pada tingkat kemiskinan.



Gambar 1.6 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020

Sumber: DIY Dalam Angka, Dioalah

Menurut Sukirno (dikutip dalam Nadya & Syafri, 2019) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum memiliki atau memperoleh pekerjaan. Pengangguran terjadi akibat kurangnya pengeluaran agregat. pengusaha memperoleh keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang mereka produksi, semakin banyak barang atau jasa yang diminta maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang secara langsung, bagi sebagian orang kehilangan pekerjaan merupakan penurunan standar kehidupan. Maka tak heran pelaku politik melakukan penawaran membuat kebijakan dalam membantu terciptanya lapangan pekerjaan.

Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki jumlah yang padat. Banyaknya jumlah penduduk jika tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan berbagai masalah salah satu contohnya

adalah pengangguran. Masalah klasik ini sangat erat hubungannya dengan banyaknya jumlah penduduk, karena setiap penduduk mempunyai kebutuhan yang harus dicukupi, memenuhi kebutuhan memakai alat yang disebut uang, pengelolaan sumber daya jika tidak bekerja maka tidak bisa mendapatkan pendapatan, hal inilah yang membuat jika banyaknya jumlah penduduk tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan lapangan pekerjaan akan menyebabkan masalah pengangguran ini sulit untuk diatasi.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, untuk membuktikan bagaimana pengaruh setiap variabel dalam mempengaruhi kemiskinan di daerah Yogyakarta, peneliti tertarik untuk menganalisis dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh PDRB Perkapita , Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, identifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan dan Pengangguran secara parsial terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020?
2. Bagaimana Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan, dan Pengangguran secara bersama-sama terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berawal dari pertanyaan yang ingin diidentifikasi oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020.
2. Mengetahui pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan dan Pengangguran secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Mahasiswa

Untuk memperoleh pemahaman dan menambah wawasan mengenai permasalahan yang diteliti.

- b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi bagi lingkungan akademika khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan perbandingan khususnya dalam hal mempelajari permasalahan kemiskinan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi objek yang akan diteliti penelitian ini dilaksanakan Kota Tasikmalaya, dengan mengakses website Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) melalui situs www.yogyakarta.bps.go.id, BAPPEDA melalui situs www.bapeda.jogyaprov.go.id

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2021 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak prodi Ekonomi Pembangunan. Berikut matriks jadwal penelitian

